

# KAJIAN PEMERINGKATAN *E-GOVERNMENT* DI TINGKAT KABUPATEN/KOTAMADYA TANGERANG

Pipin Farida Ariyani

## Abstrak

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* mulai memicu pemerintah daerah untuk segera menerapkan *e-government* di daerahnya masing-masing guna terlaksananya pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. Untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan *e-government*, Depkominfo menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintahan. Acuan dibuat dalam bentuk pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI). Selama 2 tahun ini (2007-2008), PeGI telah diterapkan di pemerintahan provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran PeGI di tingkat kabupaten/kota. Penelitian dilakukan dengan studi literatur dan wawancara dengan metodologi kualitatif. Dengan pendekatan *system thinking*, dilakukan analisis kesesuaian indikator-indikator penilaian pada lima dimensi PeGI. Hasil dari penelitian ini adalah matrik indikator-indikator penilaian pada PeGI pada tingkat kabupaten/kotamadya Tangerang.

*Kata kunci* : PeGI, kabupaten/kota, indikator

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Inisiatif *e-government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, untuk mendukung pemerintahan yang baik *e-government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Untuk menindaklanjuti implementasi *e-government* sendiri dengan mengacu pada INPRES No.3 tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, Depkominfo mengeluarkan peraturan No.28 tahun 2006 tentang pengaturan nama-nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inisiatif-inisiatif seperti inilah yang mulai memicu pemerintah-pemerintah daerah untuk segera menerapkan *e-government* di daerahnya masing-masing.

Munculnya inisiatif-inisiatif pemerintah tentang pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal khususnya kesiapan dalam menerapkan *e-government*. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah belum jelas arahnya. Apakah langkah yang diambil sudah tepat sasaran untuk menuju penerapan *e-government*. Untuk bisa mengukur kesiapan pemerintah dalam penerapan *e-government*, Depkominfo sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang menangani kebijakan mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi telah melakukan evaluasi untuk menentukan standar baku

dalam pemeringkatan penerapan *e-government* yang tertuang dalam Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PeGI).

## B. Permasalahan

PeGI merupakan metodologi untuk *assessment* kesiapan pemerintah dalam penerapan *e-government* yang hasil akhirnya berupa nilai yang dapat digunakan untuk menyusun peringkat. Dalam mengukur *assessment*, cara yang dilakukan PeGI adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator penerapan *e-government* yang dikelompokkan dalam 5 dimensi. Sampai saat ini implementasi PeGI sudah dilakukan selama 2 tahun (2007-2008) pada tingkat pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem masih perlu diuji dengan perluasan *assessment* yang dilakukan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota. Yang menjadi pertanyaan riset dari penelitian ini adalah "Seberapa jauhkah pemeringkatan *e-government* di Indonesia (PeGI) pada penerapan tingkat kabupaten/kota Tangerang?"

## C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis secara kualitatif untuk melihat indikator-indikator penilaian dalam PeGI pada penerapan tingkat kabupaten/kota Tangerang. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana penerapan *e-government* pada tingkat kabupaten/kota Tangerang.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian E-Government

*E-government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: *wide area network*, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya.

### B. Pengembangan E-Government

Saat ini, Indonesia sedang dalam proses perubahan pemerintahan yang bersih, transparan, dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui transformasi organisasi menuju *e-government*, dimana seperti yang tercantum dalam Inpres No.3/2003 pengembangan *e-government* dilakukan dengan cara:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi
- b. Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus tersedia.

Depkominfo dalam melaksanakan kebijakan nasional mengenai *e-government* telah membuat acuan untuk melakukan penilaian pengembangan melalui pemeringkatan *e-*

*government* Indonesia acuan bagi pengembangan dorongan bagi peningkatan yang utuh, seimbang dan lingkungan pemerintahan yang dijabarkan menjangkau sejauh mana kesiapan Kelima dimensi pada Perencanaan. Untuk yang terdapat pada PeGI

Tabel 1. Dimensi dan

Dimensi	
Kebijakan	1. Visi
	2. Strategi
	3. Kebijakan
	4. Perencanaan
	5. Kelembagaan
	6. Infrastruktur
	7. Sistem Aplikasi
	8. Perencanaan
Kelembagaan	1. Kelembagaan
	2. Tujuan
	3. Struktur
	4. Sistem
	5. Perencanaan
Infrastruktur	1. Dasar
	2. Jaringan
	3. Keamanan
	4. Fasilitas
	5. Daya
	6. Pemeliharaan
	7. Investasi
Aplikasi	1. Situasi
	2. Aplikasi
	3. Aplikasi
	4. Aplikasi
	5. Aplikasi
	6. Aplikasi
	7. Aplikasi
	8. Manajemen
	9. Investasi
Perencanaan	1. Perencanaan
	2. Manajemen
	3. Sistem
	4. Dokumen

government Indonesia (PeGI). PeGI dibentuk dengan tujuan, antara lain: menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah; memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif; dan mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Pada PeGI terdapat 5 (lima) kelompok dimensi yang dijabarkan menjadi 33 sub dimensi sebagai indikator penilaian untuk mengukur sejauh mana kesiapan atau pelaksanaan *e-government* pada tingkat propinsi di Indonesia. Kelima dimensi pada PeGI antara lain Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Untuk lebih jelasnya dimensi dan indikator penilaian (sub dimensi) yang terdapat pada PeGI disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Penilaian *E-government* di Indonesia (Depkominfo)

Dimensi	Indikator
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan misi berkaitan dengan TIK</li> <li>2. Strategi penerapan kebijakan</li> <li>3. Pedoman</li> <li>4. Peraturan</li> <li>5. Ketetapan instansi</li> <li>6. Anggaran</li> <li>7. Skala prioritas</li> <li>8. Audit</li> </ol>
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan organisasi</li> <li>2. Tupoksi</li> <li>3. SOP</li> <li>4. SDM</li> <li>5. Pengembangan SDM</li> </ol>
Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Center</li> <li>2. Jaringan Data</li> <li>3. Keamanan</li> <li>4. Fasilitas pendukung infrastruktur TIK</li> <li>5. Disaster recovery</li> <li>6. Pemeliharaan TIK</li> <li>7. Inventaris peralatan TIK</li> </ol>
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situs wajib (Homepage)</li> <li>2. Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan)</li> <li>3. Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi &amp; Manajemen)</li> <li>4. Aplikasi fungsional utama 3 (Legisiasi)</li> <li>5. Aplikasi fungsional utama 4 (Pembangunan)</li> <li>6. Aplikasi fungsional utama 5 (Keuangan)</li> <li>7. Aplikasi fungsional utama 6 (Kepegawaian)</li> <li>8. Manual/petunjuk aplikasi TIK</li> <li>9. Inventaris aplikasi TIK</li> </ol>
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian/fungsi</li> <li>2. Master plan</li> <li>3. Sistem perencanaan</li> <li>4. Dokumentasi</li> </ol>

### C. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah yang dijelaskan disini merujuk pada *Blue Print Sistem Aplikasi E-Government* (Kominfo, 2004) yang disarikan dari Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 2009. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pemerintahan daerah mempunyai daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah *kabupaten/kota* adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah masing-masing

### III. HASIL DAN ANALISA

Tahun 2008 Pemerintah daerah Tangerang dianugerahi Penghargaan *Website* terbaik kategori *e-government Award* 2008 dari Warta Ekonomi. Bermula dari hal ini geliat pengembangan *e-government* di kota Tangerang mulai terasa. Kantor Pengolahan data Elektronik mulai diberi tanggung jawab untuk mengembangkan *e-government* di kota Tangerang. Sesuai dengan PERDA baru mulai tahun depan KPDE berubah fungsinya menjadi Dinas Teknologi dan Informasi. KDPE selaku unit yang bertanggung jawab terhadap pengolahan data elektronik berupaya menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang kenal dengan RIP-SIMDA Kota Tangerang (Kepala KPDE, 2008) yang berpedoman pada cetak biru tahapan pengembangan *e-government* yang dikeluarkan Kominfo.

Adanya RIP-SIMDA bisa dilihat sebagai inisiatif pemkab/kota dalam pengembangan *e-government*. Terdapat bermacam-macam model pengukuran dan indikator-indikator yang dapat dipakai untuk menilai sejauh mana penerapan *e-government* dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja maupun pelayanan publik. Pemerintah sendiri melalui Depkominfo, telah menciptakan 5 indikator penilaian *e-government* yang

disebut Pemingkatan kelembagaan, infrastruktur dengan mengambil as Pengolahan Data Elek mendalam tentang kota

#### A. Dimensi Kebijakan

Pada dimensi kebij dan misi, strategi pen prioritas, serta audit ( yang berarti bahwa ke penilaian secara mena dimensi.

#### a. Visi dan Misi

Dilihat dari visi dan (tiga). Nilai ini ber yang berkaitan den dengan adanya Ke Organisasi dan Ta Secara umum visi dikatakan baik.

#### b. Strategi Penerapan

Dilihat dari strateg sebesar 1 (satu). Na kebijakan TIK. Sec TIK di kota Tang

#### c. Pedoman

Dilihat dari pedoma ini berarti kota Tan TIK. Saat ini sela Manajemen Daerah *government* yang di

#### d. Peraturan

Dilihat dari sub dim ini berarti kota Tan Keputusan Kepala pelaksanaannya me Strategi Nasional P TIK di kota Tang

#### e. Ketetapan Instansi

Dilihat dari sub dan (tiga). Nilai ini ber berkaitan dengan T didukung dengan a 2001 tentang Orga Tangerang. Hanya

disebut *Pemeringkatan e-government Indonesia* atau *PeGI* yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Metode penilaian dilakukan dengan mengambil *sample* perwakilan kota Tangerang khususnya pada Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Berikut ini akan disajikan penilaian secara mendalam tentang kota Tangerang berdasarkan masing-masing dimensi:

#### A. Dimensi Kebijakan

Pada dimensi kebijakan terdiri atas 8 (delapan) sub dimensi yang dinilai, yaitu: visi dan misi, strategi penerapan, pedoman, peraturan, ketetapan instansi, anggaran, skala prioritas, serta audit (lihat lampiran 2). Kota Tangerang memperoleh nilai rata-rata 1,88 yang berarti bahwa kebijakan yang ada masih tergolong cukup. Berikut akan disajikan penilaian secara mendalam tentang kota Tangerang berdasarkan masing-masing sub dimensi.

##### a. Visi dan Misi

Dilihat dari visi dan misi organisasinya, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 3 (tiga). Nilai ini berarti kota Tangerang dapat dikatakan sudah memiliki visi dan misi yang berkaitan dengan TIK dan sudah terdokumentasi dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Kepala Daerah Tangerang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Tangerang. Secara umum visi dan misi yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan baik.

##### b. Strategi Penerapan Kebijakan

Dilihat dari strategi penerapan kebijakannya, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai strategi penerapan kebijakan TIK. Secara umum strategi penerapan kebijakan yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

##### c. Pedoman

Dilihat dari pedomannya, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai pedoman dalam penerapan TIK. Saat ini sedang disusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (RIP-SIMDA) berpedoman pada cetak biru sistem aplikasi *e-government* yang dikeluarkan Depkominfo.

##### d. Peraturan

Dilihat dari sub dimensi peraturan, kota Tangerang mendapatkan nilai 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai peraturan yang berkaitan dengan TIK. Keputusan Kepala Daerah hanya sebatas pada kelembagaan. Mengenai teknis pelaksanaannya merujuk pada INPRES No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Secara umum peraturan penerapan TIK di kota Tangerang masih bisa dikatakan kurang.

##### e. Ketetapan Instansi

Dilihat dari sub dimensi ketetapan instansi, kota Tangerang mendapatkan nilai 3 (tiga). Nilai ini berarti kota Tangerang sudah mempunyai ketetapan instansi yang berkaitan dengan TIK namun belum atau kurang diterapkan dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Kepala Daerah Tangerang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Tangerang. Hanya saja keputusan Kepala Daerah tersebut sebatas penyediaan

kelembagaan. Belum ada kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah mengenai pelaksanaan atau pengembangan *e-government* itu sendiri.

f. Anggaran

Dilihat dari sub dimensi anggaran, kota Tangerang mendapatkan nilai 3 (tiga). Nilai ini berarti kota Tangerang sudah mempunyai anggaran namun belum atau kurang optimal. Penyusunan anggaran harus melewati BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) sebelum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah disetujui, kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Secara umum anggaran yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan baik.

g. Skala Prioritas

Dilihat dari sub dimensi skala prioritas, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai penentuan skala prioritas yang berkaitan dengan TIK. Keterbatasan KPDE dalam membuat wewenang sehingga hanya bisa mengajukan usul berdasarkan inisiatif dan permintaan masyarakat (didapat melalui buku tamu/kotak pengaduan di *website*). Usulan tersebut dituangkan dalam rencana kegiatan yang akan diserahkan kepada Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA).

h. Audit

Dilihat dari sub dimensi audit, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang sudah ada kegiatan audit namun masih bersifat *ad hoc*. Audit hanya terbatas pada perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kerja sesuai dengan penyusunan anggaran yang disetujui. Kegiatan audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan audit yang berkaitan dengan TIK belum dilakukan. Masih terbatas pada kegiatan *manintenance* oleh pihak KPDE itu sendiri. Secara umum audit yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan cenderung cukup.

B. Dimensi Kelembagaan

Pada dimensi kelembagaan terdiri atas 5 (lima) sub dimensi yang dinilai, yaitu: keberadaan organisasi, tupoksi, SOP, SDM, serta pengembangan SDM (lihat lampiran 2). Kota Tangerang memperoleh nilai rata-rata 2,00 yang berarti bahwa kelembagaan yang ada masih tergolong cukup. Berikut akan disajikan penilaian secara mendalam tentang kota Tangerang berdasarkan masing-masing sub dimensi.

a. Keberadaan Organisasi

Dilihat dari sub dimensi keberadaan organisasi, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 3 (tiga). Nilai ini berarti kota Tangerang sudah mempunyai unit yang mengelola TIK yang jelas strukturnya namun tidak berdiri sendiri serta memiliki wewenang yang terbatas. Secara umum keberadaan organisasi yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan baik.

b. Tupoksi

Dilihat dari sub dimensi tugas pokok dan fungsinya, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 3 (tiga). Nilai ini berarti kota Tangerang mempunyai tupoksi yang berkaitan dengan TIK namun belum jelas. KPDE mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemkab/kota dibidang pengolahan data elektronik. KPDE juga mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang

pengolahan dan layanan data, perusahaan ketatausahaan elektronik. *Website* dan Perangkat Daerah

c. SOP

Dilihat dari sub dimensi SOP, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Secara umum SOP yang ada

d. SDM

Dilihat dari sub dimensi SDM, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Kota Tangerang memiliki kemampuan layanan yang ada

e. Pengembangan SDM

Dilihat dari sub dimensi pengembangan SDM, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Kota Tangerang memiliki SKPD mengenai pengembangan SDM yang berhubungan dengan TIK

C. Dimensi Infrastruktur

Pada dimensi infrastruktur, kota Tangerang memperoleh nilai sebesar 2 (dua). Kota Tangerang memperoleh nilai sebesar 2 (dua) yang berarti bahwa infrastruktur yang ada tergolong cukup. Kota Tangerang berdasarkan

a. Data Center

Dilihat dari sub dimensi data center, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti bahwa kota Tangerang kurang didukung Bank Data yang ada pada tingkat SKPD juga belum ada.

b. Jaringan Data

Dilihat dari sub dimensi jaringan data, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti bahwa kota Tangerang dan memberikan layanan antar SKPD yang

oleh Kepala Daerah  
sendiri.

kan nilai 3 (tiga). Nilai  
belum atau kurang  
(Badan Perencanaan  
Daerah (DPRD). Setelah  
anggaran yang ada.  
kota Tangerang bisa

apatkan nilai sebesar 1  
tentukan skala prioritas  
membuat wewenang  
siatif dan permintaan  
website). Usulan tersebut  
Badan Perencanaan

nilai sebesar 2 (dua).  
namun masih bersifat *ad*  
pelaksanaan program  
egiatan audit dilakukan  
yang berkaitan dengan  
ance oleh pihak KPDE  
di kota Tangerang bisa

si yang dinilai, yaitu:  
SDM (lihat lampiran 2).  
hwa kelembagaan yang  
cara mendalam tentang

ang mendapatkan nilai  
mempunyai unit yang  
sendiri serta memiliki  
sasi yang berhubungan

Tangerang mendapatkan  
mempunyai tupoksi yang  
mempunyai tugas pokok  
olahan data elektronik.  
is pelaksanaan dibidang

pengolahan data elektronik, pelaksanaan pengolahan data masukan, pemberian layanan data, pengkoordinasian kegiatan di bidang kearsipan, dan penyelenggaraan ketatausahaan. Bisa dilihat fungsi utama KDPE terbatas hanya pada pengolahan data elektronik. Selama ini dilakukan melalui pemberian layanan informasi melalui *website* dan penyediaan Bank Data yang berisi data atau informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kota Tangerang.

c. SOP

Dilihat dari sub dimensi SOP (*Standard Operating Procedure*), kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai iri berarti kota Tangerang tidak memiliki SOP yang berkaitan dengan TIK atau walaupun ada masih kurang jelas. Secara umum SOP yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

d. SDM

Dilihat dari sub dimensi SDM (sumber daya manusia), kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai SDM yang memiliki kemampuan TIK atau walaupun ada jumlahnya masih kurang. Penyediaan layanan yang ada pada tiap-tiap SKPD masih berkerjasama dengan pihak lain.

e. Pengembangan SDM

Dilihat dari sub dimensi pengembangan SDM, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang memiliki program pengembangan SDM namun masih bersifat *ad hoc*. Seperti misalnya pelatihan diantara kalangan SKPD mengenai TIK sudah dilakukan. Secara umum pengembangan SDM yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan cukup.

C. Dimensi Infrastruktur

Pada dimensi infrastruktur terdiri atas 7 (tujuh) sub dimensi yang dinilai, yaitu: *data center*, jaringan data, keamanan, fasilitas pendukung infrastruktur TIK, *disaster recovery*, pemeliharaan TIK, dan inventaris peralatan TIK (lihat lampiran 2). Kota Tangerang memperoleh nilai rata-rata 1,71 yang berarti bahwa infrastruktur yang ada masih tergolong cukup. Berikut akan disajikan penilaian secara mendalam tentang kota Tangerang berdasarkan masing-masing sub dimensi.

a. *Data Center*

Dilihat dari sub dimensi *data center*, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang memiliki *data center* namun belum atau kurang didukung fasilitas yang memadai. *Data center* yang dikembangkan berupa Bank Data yang dipergunakan untuk menyimpan data elektronik dari setiap SKPD yang ada pada kota Tangerang. Kendalanya adalah belum ada kesadaran pihak SKPD untuk mengintegrasikan data mereka ke *data center*. Sistem aplikasi pada tiap-tiap SKPD juga belum terhubung ke *data center*, walaupun infrastruktur jaringan sudah ada.

b. Jaringan Data

Dilihat dari sub dimensi jaringan data, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang memiliki infrastruktur jaringan yang memadai dan memberikan kemudahan akses pada *user* namun penggunaan dan kapasitas layanannya masih terbatas. KPDE telah menyediakan sarana infrastruktur jaringan antar SKPD yang ada melalui jaringan LAN (*Local Area Network*) untuk gedung

Kepala daerah dan DPRD, sedangkan untuk jaringan ke SKPD lain di luar gedung Kepala Daerah menggunakan jaringan *wireless*.

c. Keamanan

Dilihat dari sub dimensi, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak memiliki mekanisme keamanan informasi maupun infrastruktur TIK. Banyaknya aplikasi yang masih terpisah atau belum terintegrasi membuat pengembangan *e-government* di kota Tangerang terhambat. Layanan publik secara *online* baru terbatas pada informasi yang disajikan pada *website* kota Tangerang.

d. Fasilitas Pendukung Infrastruktur TIK

Dilihat dari sub dimensi fasilitas pendukung infrastruktur TIK, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang mempunyai fasilitas pendukung namun kurang memadai. Untuk mengatasi masalah ketersediaan data pada saat lampu mati telah tersedia UPS (*Uninterrupt Power Supply*) sebagai cadangan catu daya. Mengenai *backup server* belum ada. Mengingat belum banyak ada layanan publik secara *online*. Secara umum fasilitas pendukung infrastruktur TIK di kota Tangerang bisa dikatakan cukup.

e. Disaster Recovery

Dilihat dari sub dimensi *disaster recovery*, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak memiliki dokumen *disaster recovery* yang berkaitan dengan TIK. KPDE selaku pemegang kebijakan mengenai pengolahan data elektronik tidak punya hak untuk campur tangan dalam penanganan aplikasi di SKPD lain. KPDE hanya bisa memberikan saran mengenai integrasi sistem aplikasi yang ada. Oleh karena sistem aplikasi masih terpisah, sehingga tanggung jawab pemeliharaan aplikasi dipegang oleh masing-masing SKPD. Secara umum *disaster recovery* yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

f. Pemeliharaan TIK

Dilihat dari sub dimensi pemeliharaan TIK, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang belum melakukan pemeliharaan infrastruktur dengan baik. Pemeliharaan infrastruktur jaringan dan data (Bank Data) merupakan tanggung jawab KPDE. Pemeliharaan belum dilakukan secara rutin dikarenakan penjadwalan pemeliharaan belum terdokumentasi dengan baik. Secara umum pemeliharaan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan cukup.

g. Inventaris Peralatan TIK

Dilihat dari sub dimensi inventaris, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang dalam kegiatan inventaris peralatan TIK belum terdokumentasi dengan baik. Inventaris peralatan TIK dilakukan oleh dinas pengadaan barang sebagai salah satu ATK (Alat Tulis Kantor).

D. Dimensi Aplikasi

Pada dimensi aplikasi terdiri atas 9 (sembilan) sub dimensi yang dinilai, yaitu: situs wajib (*homepage*), aplikasi fungsional utama pelayanan, aplikasi fungsional administrasi dan manajemen, aplikasi fungsional utama legislasi, aplikasi fungsional utama pembangunan, aplikasi fungsional utama keuangan, aplikasi fungsional utama kepegawaian, manual/petunjuk aplikasi TIK, serta inventaris aplikasi TIK (lihat lampiran 2). Kota Tangerang memperoleh nilai rata-rata 1,78 yang berarti bahwa aplikasi yang ada

masih tergolong Tangerang berdasarkan

a. Situs Wajib

Dilihat dari nilai sebesar 3 (tiga) dinamik dan dilihat pada daerah Tangerang *Government* melaksanakan

b. Aplikasi Fungsi

Dilihat dari nilai kota Tangerang memiliki satu Aplikasi pelayanan buku tamu pada yang tersedia

c. Aplikasi Fungsi

Dilihat dari nilai dan manajemen kota Tangerang utama 2 (dua) elektronik.

d. Aplikasi Fungsi

Dilihat dari nilai kota Tangerang memiliki satu Aplikasi legislasi pemilihan Pila hasil pemilihan perundangan yang

e. Aplikasi Fungsi

Dilihat dari nilai pembangunan kota Tangerang berkaitan dengan kota Tangerang

f. Aplikasi Fungsi

Dilihat dari nilai kota Tangerang tidak memiliki keuangan.

g. Aplikasi Fungsi

Dilihat dari nilai kepegawaian, ke

masih tergolong cukup. Berikut akan disajikan penilaian secara mendalam tentang kota Tangerang berdasarkan masing-masing sub dimensi.

a. Situs Wajib (*Homepage*)

Dilihat dari sub dimensi situs wajib (*homepage*), kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 3 (tiga). Nilai ini berarti kota Tangerang memiliki *website* yang bersifat dinamik dan informasi yang disajikan selalu diperbaharui. Halaman *website* bisa dilihat pada alamat <http://www.tangerangkota.go.id>, dimana tahun 2008 Pemerintah daerah Tangerang mendapatkan Penghargaan *Website* Terbaik kategori Kota pada *E-Government Award* 2008 dari Warta Ekonomi atas komitmen dan upayanya dalam melaksanakan *e-government* khususnya dalam mengelola *website* Kota Tangerang.

b. Aplikasi Fungsional Utama 1 (Pelayanan)

Dilihat dari sub dimensi aplikasi fungsional utama 1 (satu) yang bersifat pelayanan, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang memiliki setidaknya 2 (dua) aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 1 (satu): Aplikasi pelayanan yang tersedia antara lain aplikasi pengaduan masyarakat melalui buku tamu pada *website* Tangerangkota dan akses CAP (*Community Access Point*) yang tersedia pada 13 kecamatan diseluruh Tangerang.

c. Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi & Manajemen)

Dilihat dari sub dimensi aplikasi fungsional utama 2 (dua) yang bersifat administrasi dan manajemen, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti kota Tangerang memiliki setidaknya 1 (satu) aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 2 (dua). Aplikasi administrasi dan manajemen yang tersedia mengenai surat elektronik.

d. Aplikasi Fungsional Utama 3 (Legislasi)

Dilihat dari sub dimensi aplikasi fungsional utama 3 (tiga) yang bersifat legislasi, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 3 (tiga). Nilai ini berarti kota Tangerang memiliki setidaknya 2 (dua) aplikasi yang termasuk dalam aplikasi utama 3 (tiga). Aplikasi legislasi yang tersedia mengenai sistem pemilu daerah dimana saat pemilihan Pilkada tahun 2008, telah bekerja sama dengan KPU untuk perhitungan hasil pemilihan. Aplikasi lainnya mengenai katalog hukum, peraturan, dan perundangan yang tersedia di <http://jdihukum.tangerangkota.go.id/>.

e. Aplikasi Fungsional Utama 4 (Pembangunan)

Dilihat dari sub dimensi aplikasi fungsional utama 4 (empat) yang bersifat pembangunan, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak memiliki aplikasi yang bersifat memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan. Secara umum aplikasi fungsional utama 4 (empat) di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

f. Aplikasi Fungsional Utama 5 (Keuangan)

Dilihat dari sub dimensi aplikasi fungsional utama 5 (lima) yang bersifat keuangan, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak memiliki aplikasi yang bersifat memberikan pelayanan yang berkaitan dengan keuangan.

g. Aplikasi Fungsional Utama 6 (Kepegawaian)

Dilihat dari sub dimensi aplikasi fungsional utama 6 (enam) yang bersifat kepegawaian, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 2 (dua). Nilai ini berarti

Kota Tangerang memiliki setidaknya 1 (satu) aplikasi yang termasuk dalam aplikasi nomor 6 (enam). Aplikasi kepegawaian yang tersedia mengenai CPNS *online*.

b. Manual/Petunjuk Aplikasi TIK

Dilihat dari sub dimensi manual/petunjuk aplikasi TIK, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak memiliki manual atau petunjuk aplikasi TIK. Aplikasi yang ada ditangani oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan. Secara umum manual/petunjuk aplikasi TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

c. Inventaris Aplikasi TIK

Dilihat dari sub dimensi inventaris aplikasi TIK, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak melaksanakan inventaris aplikasi TIK. Setiap produk aplikasi pelayanan tidak selalu dilaporkan kepada KPDE. Kebijakan penyediaan aplikasi dipegang oleh masing-masing SKPD sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Secara umum inventaris aplikasi TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

E. Dimensi Perencanaan

Pada dimensi perencanaan terdiri atas 4 (empat) sub dimensi yang dinilai, yaitu: pengorganisasian/fungsi, *master plan*, sistem perencanaan, dan dokumentasi (lihat lampiran 2). Kota Tangerang memperoleh nilai rata-rata 1,00 yang berarti bahwa aplikasi yang ada tergolong kurang. Berikut akan disajikan penilaian secara mendalam tentang kota Tangerang berdasarkan masing-masing sub dimensi.

a. Pengorganisasian/Fungsi

Dilihat dari sub dimensi pengorganisasian atau fungsi, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai elemen organisasi untuk melakukan perencanaan TIK. KPDE sebagai kantor yang bertanggung jawab atas pengolahan data elektronik masih memiliki SDM yang terbatas. Dari 13 orang staf yang ada harus melaksanakan tugas rutin ketatausahaan dan tugas yang berhubungan dengan TIK serta didukung dengan keahlian yang tidak merata. Secara umum pengorganisasian fungsi yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

b. *Master Plan*

Dilihat dari sub dimensi *master plan*, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai dokumen *master plan* yang berkaitan dengan TIK. Secara umum *master plan* yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang. Dokumen *master plan* dijadikan sebagai rencana strategis, skala prioritas, dan pedoman dalam pengembangan *e-government*.

c. Sistem Perencanaan

Dilihat dari sub dimensi sistem perencanaan, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai sistem perencanaan yang berkaitan dengan TIK atau sistem perencanaan yang ada belum baku. Secara umum sistem perencanaan yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

d. Dokumentasi

Dilihat dari sub dimensi dokumentasi, kota Tangerang mendapatkan nilai sebesar 1 (satu). Nilai ini berarti kota Tangerang tidak mempunyai dokumentasi perencanaan

rinci sebagai ke- sangatlah wajar dengan TIK. Se- Tangerang bisa d-

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang lebih menitikberatkan pelayanan kepada diperlukan. Berdasarkan Tangerang dengan tabel 2. Dalam mel- (eukup); 3 (baik); dan

Dimensi	
Kebijakan (8 sub dimensi)	.....
Kelembagaan (5 sub dimensi)	.....
Infrastruktur (7 sub dimensi)	.....

termasuk dalam aplikasi  
CPNS online.

Tangerang mendapatkan  
tidak memiliki manual atau  
masing-masing SKPD yang  
di kota Tangerang bisa

erang mendapatkan nilai  
melaksanakan inventaris  
laporkan kepada KPDE.  
SKPD sesuai dengan  
K di kota Tangerang bisa

ensi yang dinilai, yaitu:  
dan dokumentasi (lihat  
ng berarti bahwa aplikasi  
cara mendalam tentang

Tangerang mendapatkan  
tidak mempunyai elemen  
sebagai kantor yang  
tidak memiliki SDM yang  
bagas rutin ketatausahaan  
dengan keahlian yang tidak  
dengan TIK di kota

dapatkan nilai sebesar 1  
dalam *master plan* yang  
hubungan dengan TIK di  
*plan* dijadikan sebagai  
hubungan *e-government*.

ang mendapatkan nilai  
tidak mempunyai sistem  
panaan yang ada belum  
dengan TIK di kota

dapatkan nilai sebesar 1  
dokumentasi perencanaan

rinci sebagai kelanjutan dari *master plan* yang berkaitan dengan TIK. Hal ini sangat wajar karena saat ini kota tidak mempunyai *master plan* yang berkaitan dengan TIK. Secara umum dokumentasi yang berhubungan dengan TIK di kota Tangerang bisa dikatakan kurang.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat pengembangan *e-government* pada tingkat kabupaten/kota lebih menitikberatkan pada fungsi operasional, bagaimana menciptakan atau menyajikan pelayanan kepada masyarakat sehingga ketersediaan infrastruktur aplikasi mutlak diperlukan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, berikut hasil penilaian kota Tangerang dengan menggunakan dimensi penilaian PeGI yang disajikan dalam bentuk tabel 2. Dalam melaksanakan penilaian, skor yang digunakan adalah 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), dan 4 (baik sekali).

Tabel 2 Hasil Penilaian PeGI Kota Tangerang

Dimensi	Indikator	Skor Penilaian
Kebijakan (8 sub dimensi)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Visi dan misi berkaitan dengan TIK</li><li>▪ Strategi penerapan kebijakan</li><li>▪ Pedoman</li><li>▪ Peraturan</li><li>▪ Ketetapan instansi</li><li>▪ Anggaran</li><li>▪ Skala prioritas</li><li>▪ Audit</li></ul>	Baik Kurang Kurang Kurang Baik Baik Kurang Cukup
Kelembagaan (5 sub dimensi)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keberadaan organisasi</li><li>▪ Tupoksi</li><li>▪ SOP</li><li>▪ SDM</li><li>▪ Pengembangan SDM</li></ul>	Baik Baik Kurang Kurang Cukup
Infrastruktur (7 sub dimensi)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Data Center</li><li>▪ Jaringan Data</li><li>▪ Keamanan</li><li>▪ Fasilitas pendukung infrastruktur TIK</li><li>▪ <i>Disaster recovery</i></li><li>▪ Pemeliharaan TIK</li><li>▪ Inventaris peralatan TIK</li></ul>	Cukup Cukup Kurang Cukup Kurang Cukup Cukup

<p>Aplikasi (9 sub dimensi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Situs wajib (Homepage)</li> <li>▪ Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan)</li> <li>▪ Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi &amp; Manajemen)</li> <li>▪ Aplikasi fungsional utama 3 (Legisiasi)</li> <li>▪ Aplikasi fungsional utama 4 (Pembangunan)</li> <li>▪ Aplikasi fungsional utama 5 (Keuangan)</li> <li>▪ Aplikasi fungsional utama 6 (Kepegawaian)</li> <li>▪ Manual/petunjuk aplikasi TIK</li> <li>▪ Inventaris aplikasi TIK</li> </ul>	<p>Baik Cukup Cukup Baik Kurang Kurang Cukup Kurang Kurang</p>
<p>Perencanaan (4 sub dimensi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengorganisasian/fungsi</li> <li>▪ Master plan</li> <li>▪ Sistem perencanaan</li> <li>▪ Dokumentasi</li> </ul>	<p>Kurang Kurang Kurang Kurang</p>

Berdasarkan tabel 2 bisa dilihat bahwa untuk kota Tangerang *range* penilaian antara *point* 1-3. Untuk lebih jelasnya mengenai prosentase penilaian bisa di lihat pada tabel 3.

Tabel 3 Tabel Prosentase Penilaian PeGI Kota Tangerang

Dimensi		Skor Penilaian			
		Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Kebijakan	Jumlah	4	1	3	0
		50.00%	12.50%	37.50%	0.00%
Kelembagaan	Jumlah	2	1	2	0
		40.00%	20.00%	40.00%	0.00%
Infrastruktur	Jumlah	2	5	0	0
		28.57%	71.43%	0.00%	0.00%
Aplikasi	Jumlah	4	3	2	0
		44.44%	33.33%	22.22%	0.00%
Perencanaan	Jumlah	4	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Berikut ini digambarkan grafik profil penilaian kota Tangerang.

Kota Tangerang ini berarti penerapan *point* dari batas bawah

B. Saran

Saran pada penelitian berikutnya adalah:

1. Penelitian ini harus diterapkan pada kabupaten/kota lain dan diselaraskan dengan
2. Penelitian ini harus penelitian selanjutnya *output* dari peng

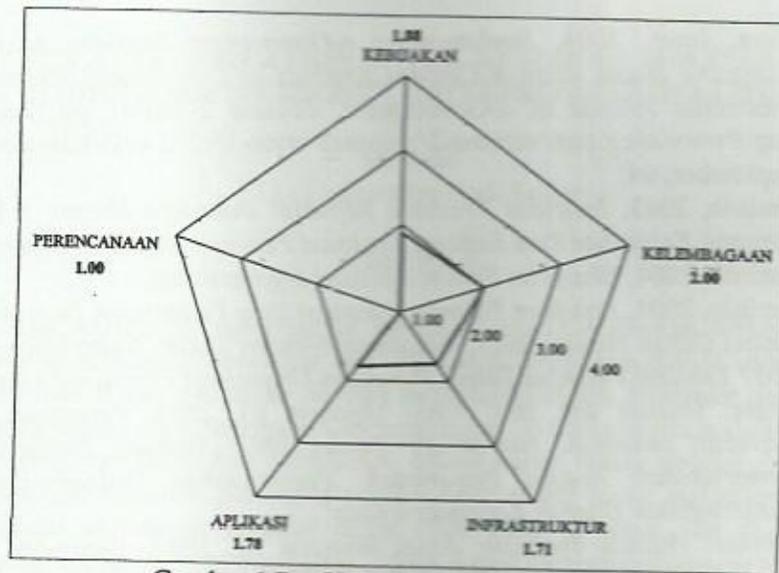
DAFTAR PUSTAKA

[1]. Caldow, Jane  
IBM Institute  
01.ibm.com  
17]

[2]. Depkominfo  
Tahun 2009

[3]. Djunaedi, A  
Pemerintah  
http://mpkd  
gov/egovtpe

Baik
Cukup
Cukup
Baik
Kurang
Kurang
Cukup
Kurang



Gambar 1 Profil Penilaian Kota Tangerang

Kota Tangerang memperoleh nilai rata-rata pada seluruh dimensi sebesar 1,67. Nilai ini berarti penerapan *e-government* di kota Tangerang cenderung cukup, lebih besar 0,16 point dari batas bawah nilai cukup.

#### B. Saran

Saran pada penelitian ini agar dapat dijadikan landasan dan refensi bagi penelitian berikutnya adalah:

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur penerapan PeGI di tingkat kabupaten/kota Tangerang. Tidak menutup kemungkinan nantinya indikator PeGI diterapkan pada kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Penggunaan indikator penilaian diselarasakan dengan pengembangan PeGI di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menilai pemeringkatan *e-government* dari inputan saja. Pada penelitian selanjutnya bisa dicari penilaian dengan melihat pada proses maupun *output* dari pengembangan *e-government*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Caldow, Janet, 1999, *The Quest for Electronic Government: A Defining Vision*, IBM Institute for Electronic Government [Online], Tersedia: <http://www-01.ibm.com/industries/government/ieg/pdf/egovvision.pdf> [2008, September, 17]
- [2]. Depkominfo, 2009, *Implementasi Peringkat E-Government Indonesia (PeGI) Tahun 2009 (PPT)*
- [3]. Djunaedi, A, 2002, *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia* [Online], Tersedia: <http://mpkd.ugm.ac.id/homepageadj/support/publikasi/ti-gov/egovtpemdaindo.pdf> [2008, September, 04]

- [4]. Kaaya, Janet, 2004, *Implementing e-Government Services in East Africa: Assessing Status through Content Analysis of Government Websites* [Online], Electronic Journal of e-Government Volume 2 Issue1 pp.39-54, Tersedia: <http://www.ejeg.com/volume-2/volume2-issue-1/v2-i1-art5-kaaya.pdf> [2008, September, 04]
- [5]. Kominfo, 2003, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003: Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*
- [6]. Kominfo, 2004, *Blueprint Sistem Aplikasi e-government*
- [7]. Kominfo, 2004, *Panduan Penyelenggaraan Situs Pemerintah Daerah*
- [8]. Menteri Dalam Negeri, 2007, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*
- [9]. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007: Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*
- [10]. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007: Tentang Organisasi Perangkat Daerah*
- [11]. M. West, Darrel, 2007, *Global E-Government, 2007* [Online], Tersedia: <http://www.insidepolitics.org/egovt07int.pdf> [2008, September, 09]
- [12]. Netchaeva, Irina, 2002, *E-Government and E-Democracy: A Comparison of Opportunities in the North and South* [Online], Tersedia: <http://java.cs.vt.edu/public/projects/digitalgov/papers/Netchaeva.EGov.Edemo.pdf> [2008, Oktober, 05]
- [13]. PIU UK, 2000, *Electronic Government Services for the 21st Century* [Online], Tersedia: [http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/strategy/assets/e\\_gov.pdf](http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/strategy/assets/e_gov.pdf) [2008, September, 21]
- [14]. Rahardjo, Budi, 2001, *Membangun E-Government* [Online], Tersedia: <http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc> [2008, September, 20]
- [15]. Sosiawan, Edwi Arief, 2008, *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia : Prespektif Content dan Manajemen* [Online], Tersedia: [http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen\\_egov.pdf](http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen_egov.pdf) [2008, September, 17]
- [16]. Sekretaris Negara RI, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004: Tentang Pemerintahan Daerah*
- [17]. The World Bank Group, *A Definition of E-Government* [Online], <http://go.worldbank.org/M1JHE0Z280> [2008, September 15]
- [18]. Warta Ekonomi, 2008, *Road To Transforming From Traditional Government into Electronic Government* [Online], Tersedia: <http://jakarta.wartaegov.com> [2008, September, 17]
- [19]. Yusuf, Suwidhi, 2008, *Pemeringkatan E-Government Indonesia*, Tesis MTI UI

Hampir semua orang yang menggunakan layanan digital yang dimungkinkan oleh teknologi ini mengalami masalah tersebut. Masalah ini berasal dari penyalahgunaan password. Memastikan password akan menggantikan sebagian sudah ada password yang merupakan penyalahgunaan. Begitu juga halnya dengan Budi Luhur telah menggunakan aplikasi tersebut yang dikatakan aman dan Factor Authentic password). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas dalam setiap network yang serupa dengan yang pertama (maka faktor yang kedua yang penerapannya dipakai diganti dan dibangkitkan dengan Sehingga diharapkan

Keyword : Security

I. PENDAHULUAN  
LATAR BELAKANG  
Single-Factor Authentication digunakan pada sistem yang mudah diingat, tanggal lahir, dan mengidentifikasi di jalankan di internet